e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10 No 5 Tahun 2023 Hal. : 2518-2535

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-UNI EMIRAT ARAB DALAM KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN PERIODE 2014-2022

Raka Gusfi Wisesa, Arief Rachman, Lukman Yudho Prakoso

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Pergeseran paradigma dalam industri pertahanan pasca Perang Dingin, diplomasi, dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, serta upaya untuk memenuhi MEF telah menjadi wacana kontemporer, di mana sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui dua Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Prabowo Subianto, dilakukan hubungan diplomatik dan kerja sama dalam bidang pertahanan, terutama mengenai kerja sama industri pertahanan. Melekat pada tonggak sejarah diplomasi pertahanan Indonesia-Uni Emirat Arab, adalah relatif baru, mengingat komitmen saat ini telah mencapai 7 (tujuh) tahun sejak PT. Pindad (perwakilan Indonesia) dan Continental Aviation Services (perwakilan Uni Emirat Arab) sepakat untuk berkolaborasi dalam lisensi senjata SS2 dan pemasaran amunisi Pindad di wilayah Timur Tengah pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya pemerintah Indonesia dalam membangun diplomasi pertahanan dengan Uni Emirat Arab, khususnya melalui kerja sama industri pertahanan. Tinjauan literatur dalam penelitian ini meliputi diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan dan implementasi kebijakan pertahanan beserta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi-kualitatif dengan teknik analisis data interaktif yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tonggak sejarah diplomasi pertahanan yang ada antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menghasilkan arus alternatif, di mana langkah awal dalam membentuk dasar dan kerangka diplomasi bilateral diwujudkan dengan mempertimbangkan strategi pertahanan, di mana strategi diplomasi pertahanan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan saling kepercayaan dan berdampak pada pengembangan industri pertahanan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, di mana Indonesia cenderung menggunakan kekuatan lunak seperti pameran, kunjungan (negara dan industri), perjanjian administratif dan formal untuk mempersiapkan fase ketiga MEF pada tahun 2024. Kerja sama antara industri pertahanan Indonesia-Uni Emirat Arab dilakukan melalui pertimbangan komponen konten lokal dan komponen offset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti DPR, Presiden, perusahaan industri pertahanan, dan institusi penelitian dan pengembangan. Kerja sama ini

*Correspondence Address : rakagusfi150995@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023.2518-2535
© 2023UM-Tapsel Press

bermanfaat dalam hal ekonomi makro, kemampuan industri, teknologi terbarukan, dan keunggulan kompetitif, tetapi perlu dievaluasi untuk transparansi kebijakan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Strategi Diplomasi Pertahanan, Kerja Sama, Industri Pertahanan, Indonesia dan Uni Emirat Arab.

PENDAHULUAN

Dampak perubahan geopolitik dalam lingkungan global saat ini, termasuk transformasi industri pertahanan pasca-Perang Dingin, mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan pada tingkat nasional, regional, dan global melalui penurunan permintaan untuk jenis peralatan militer tertentu. Pasca-Perang Dingin, industri pertahanan mengalami perubahan yang signifikan dengan kontraktor pertahanan beradaptasi melalui diversifikasi produk, mencari pasar baru, mengprivatisasi fungsi militer, dan munculnya perusahaan militer swasta, sehingga membuat industri ini lebih kompleks, beragam, dan menekankan teknologi, inovasi, dan pasar global (Supriyatno, 2017).

Industri pertahanan Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi negara dan upaya modernisasi militer, dengan berbagai perusahaan, termasuk badan usaha milik negara dan sektor swasta, memproduksi peralatan militer dan senjata, sementara pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan kemampuan militer dan memperluas ekspor pertahanan ke negara-negara tetangga. Nawa Cita, yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, mencakup agenda pemerintah dengan fokus utama pada kemandirian politik, ekonomi, dan budaya, yang mewujudkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal sebagai Trisakti. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan luar negeri 'bebas dan aktif', keamanan nasional, dan juga pengembangan pertahanan nasional Tri Matra yang terintegrasi berdasarkan kepentingan nasional dan penguatan identitas sebagai negara maritim (Komisi Pemilihan Umum, 2014).

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memperkenalkan visi "Poros Maritim Dunia" (GMA), dengan tujuan mengubah Indonesia menjadi negara maritim yang memiliki kedaulatan penuh, kemajuan, kemandirian, dan kekuatan, sambil memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan regional dan global. Visi ini melibatkan pengembangan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan peningkatan kemampuan pertahanan maritim (The Jakarta Post, 2017).

Untuk membangun kemampuan pertahanan dan keamanan, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan diplomasi dan kerja sama dengan aktor negara dan non-negara, dengan memperhatikan kepentingan nasional, kedaulatan, martabat, dan kebanggaan nasional, sambil mengadopsi kebijakan

luar negeri 'bebas dan aktif' untuk mendorong kerja sama tanpa kecenderungan aliansi tertentu, yang dapat dikategorikan sebagai diplomasi pertahanan, sejak Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) sepakat untuk bekerjasama dalam lisensi senjata SS2 dan pemasaran amunisi Pindad di wilayah Timur Tengah pada tahun 2015. Periode delapan tahun kerja sama bilateral antara Indonesia dan UEA di sektor pertahanan (2014-2022) perlu dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan dalam hubungan antara kedua negara, memahami dampaknya terhadap hubungan regional, mengeksplorasi kerja sama masa depan yang potensial, dan memberikan wawasan berharga terhadap perkembangan hubungan bilateral yang lebih kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai fenomena dan realitas sosial dengan cara yang ideografis. Pendekatan kualitatif juga menekankan logika induktif, di mana kategori-kategori dikembangkan berdasarkan interaksi antara peneliti dan informan di lapangan atau melalui analisis data yang ditemukan. Sebagai hasilnya, penelitian kualitatif menghasilkan informasi kontekstual yang dapat membantu mengidentifikasi pola atau teori yang menjelaskan fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan desain studi kasus. Menurut Creswell, pendekatan studi kasus melibatkan penyelidikan terhadap satu kasus atau pemeriksaan masalah atau isu tertentu, dengan menggunakan kasus tersebut sebagai ilustrasi khusus. Penelitian ini akan mengeksplorasi situasi kehidupan nyata, melibatkan kasus-kasus yang relevan, dan memanfaatkan berbagai sumber informasi sebagai dasar pengumpulan data. Kasus yang akan diteliti adalah fenomena industri pertahanan dan upaya kerja sama pertahanan dalam perspektif diplomasi pertahanan antara Indonesia dan UEA (Creswell, 2003, p. 15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dan Diplomasi Pertahanan: Sebuah Telaah Teoretis

Menurut Clausewitz (1984), strategi dijelaskan sebagai berikut: "Strategi adalah jembatan yang menghubungkan kekuatan militer dengan tujuan politik. Ini bukanlah kekuatan militer itu sendiri maupun tujuan politik. Dengan strategi, saya maksud penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan untuk tujuan kebijakan." Konsep strategi pertahanan, yang berasal dari karya Lykke (1998), menggabungkan tujuan, sarana, dan cara (ends-means-ways) ke dalam konsep strategis. Awalnya ditujukan untuk komunitas militer dalam menghadapi ancaman, prinsip-prinsipnya juga dapat diterapkan pada operasi militer di luar situasi perang dengan modifikasi yang sesuai. Diplomasi menjadi salah satu instrumen strategi pertahanan, bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional satu atau beberapa negara.

Diplomasi pertahanan sebagai bagian dari wacana strategi pertahanan secara luas dijelaskan sebagai "penggunaan kekuatan bersenjata (di luar peperangan) untuk mencapai tujuan nasional" (Edmonds & Mills, 1998). Sementara itu, diplomasi pertahanan juga dijelaskan sebagai "penggunaan damai personel militer, termasuk atase militer, untuk mencegah konflik (Plessis, 2008). Dalam perspektif lain, diplomasi pertahanan (juga dikenal sebagai diplomasi militer) adalah penggunaan non-kekerasan alat pertahanan suatu negara untuk mencapai tujuan strategis pemerintah melalui kerja sama dengan

negara lain. Ini termasuk pertukaran perwira, kunjungan kapal, misi pelatihan, dan latihan militer bersama, yang semuanya memiliki arti penting yang meningkat dalam urusan global saat ini (Cottey & Forster, 2004).

Diplomasi pertahanan, di sisi lain, mencakup karakteristik seperti upaya membangun hubungan dengan mantan lawan dan *Confidence Building Measures* (CBMs), fokus pada kebijakan dan tata kelola militer yang efektif, mendukung perdamaian global, dan membentuk persepsi dan pola pikir militer negara lain (Multazam, 2010). Karakteristik utama strategi diplomasi pertahanan meliputi penggunaan diplomasi pertahanan untuk langkah-langkah membangun kepercayaan (CBM), pembangunan kapasitas (CB), dan pengembangan industri pertahanan (DI) (Syawfi, 2009, p. 14). Dalam artikel ini, penelitian difokuskan pada diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan.

Diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan bertujuan untuk membangun dan memperkuat industri pertahanan suatu negara, mencapai kemandirian politik dan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada pengadaan peralatan pertahanan, dan memberikan manfaat ekonomi melalui kerja sama internasional (Hoyt, 2007). Diplomasi pertahanan dilakukan melalui: a. Kolaborasi strategis antara negara-negara dalam produksi senjata; b. Kemitraan strategis antara negara-negara dalam pengembangan dan penelitian senjata; c. Transfer lisensi; d. Investasi di sektor industri pertahanan; serta e. Transfer teknologi (Syawfi, 2009, p. 20).

Diplomasi pertahanan secara erat terkait dengan kebijakan pertahanan, di mana sektor pertahanan adalah komponen penting dari kebijakan luar negeri suatu negara, berperan dalam membentuk posisi keamanan, melindungi kepentingan, dan membela terhadap ancaman potensial (Stohl, 2008). Kebijakan pertahanan, sebagai bagian dari kebijakan publik secara umum, perlu diimplementasikan melalui pertimbangan yang cermat, menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi. Ada lima aspek dalam kebijakan pertahanan, yaitu terintegrasi, interaktif, transparansi, kontrol, dan akuntabilitas (IITCA) (Prakoso, 2016). Kelima komponen dan aspek ini mempengaruhi implementasi kebijakan pertahanan dalam mengembangkan komponen pertahanan nasional, berfungsi sebagai katalis dalam memproyeksikan dan memprediksi kebijakan luar negeri dan kerja sama industri pertahanan. Penelitian ini melibatkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard, serta Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, dalam diplomasi pertahanan Indonesia-UAE.

Eisenhower memperkenalkan konsep "kompleks militer-industri (MIC)" yang menggambarkan kompleksitas hubungan politik-ekonomi antara lembaga legislatif, militer nasional, dan industri persenjataan dalam kebijakan pertahanan. Ini melibatkan sumbangan politik, persetujuan kebijakan pengeluaran militer, dan upaya lobi untuk mendukung birokrasi pertahanan dan industri. Kemudian, MIC, sebagai hasil dari konsep "segitiga besi pertahanan (DIT)", mencerminkan kompleksitas hubungan strategis antara negara (parlemen dan departemen pertahanan), industri pertahanan, dan peran mereka yang dapat mempengaruhi kedaulatan, kemandirian, aliansi, kerja sama, dan privatisasi dalam pertahanan, dengan dampak signifikan pada perang antarnegara (Matthews & Maharani, 2009). Proposisi utama dalam DIT menyatakan bahwa hubungan konstituen antara industri, parlemen, dan pemerintah dalam pengadaan

pertahanan memainkan peran penting dalam mencapai kemampuan militer yang dibutuhkan dan memperoleh dukungan legislasi, anggaran, dan teknologi yang diperlukan untuk pengadaan pertahanan (Noll, 1971, pp. 1-10) (Sorensen, 2009, p. 1).

Industri pertahanan terkait dengan pengadaan pertahanan, ketika Kaldor mengadopsi pendekatan sistematis yang mengintegrasikan prinsip penawaran dan permintaan dari ekonomi, serta prinsip birokrasi dari ilmu politik, untuk memahami proses persepsi ancaman dan pengadaan pertahanan. Elemen penawaran melibatkan faktor eksternal yang merespons permintaan, sementara permintaan adalah faktor internal yang merespons penawaran. Interaksi ini terjadi dalam konteks militer dan pertahanan, dengan elemen penawaran memiliki aspek sistemik (kondisi global/internasional) dan aspek institusional (peran angkatan bersenjata, birokrasi pemerintah, dan politisi dalam menentukan kondisi internasional) (Kaldor, Albrecht, & Schméder, 1998).

Kebijakan industri pertahanan adalah faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu negara, melibatkan strategi generik seperti kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan diferensiasi dalam industri (Porter, 1980). Keunggulan kompetitif dalam industri pertahanan bergantung pada faktor seperti teknologi, kapasitas produksi, dan akses pasar, yang dipengaruhi oleh kebijakan industri pertahanan pemerintah. Kebijakan ini perlu menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan investasi, memfasilitasi akses global, dan mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan stabilitas militer. Hubungan yang erat antara keunggulan kompetitif dan kebijakan industri pertahanan memengaruhi kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, di mana pendekatan keunggulan kompetitif digunakan untuk menjelaskan konteks kerja sama tersebut dan langkah-langkah khusus yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian industri pertahanan.

Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Uni Emirat Arab melalui Kerjasama Industri Pertahanan

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya kerjasama dengan beberapa industri pertahanan di UEA, atau dengan kata lain diplomasi pertahanan Indonesia-UEA telah berhasil menyepakati beberapa kesepakatan terkait kerjasama industri pertahanan. Kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan UEA yang telah dimulai sejak tahun 2017 menunjukkan adanya proses diplomasi pertahanan yang terus berlangsung antara kedua negara, meskipun hubungan diplomatik telah berlangsung lama. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT. Pindad dan CAS pada tahun 2015, sebelum adanya peraturan resmi. Hal ini menandakan keharmonisan diplomasi yang substansial antara kedua negara yang telah terjalin sejak awal berdirinya Republik Indonesia.

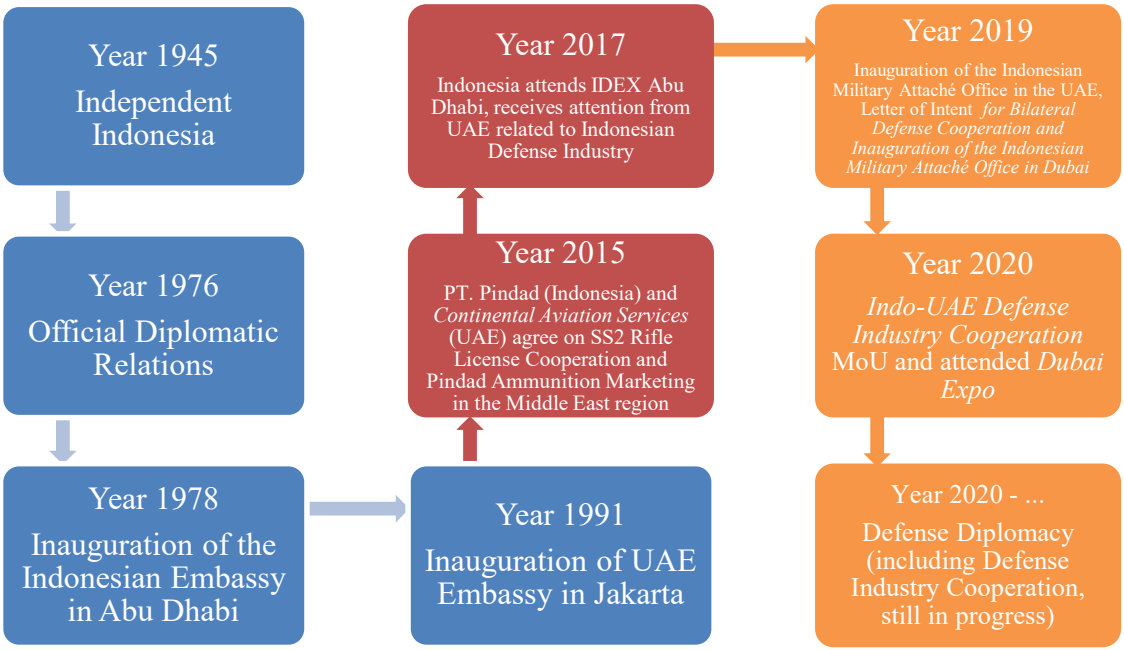

Keterangan: : Era Pra-Presiden Joko Widodo

: Era Presiden Joko Widodo (Menteri Pertahanan Ryamizard)

: Era Presiden Joko Widodo (Menteri Pertahanan Prabowo)

Bagan 1. Proses Diplomasi Pertahanan Indonesia-Uni Emirat Arab. Sumber: Peneliti (2023)

Diplomasi sebagai instrumen kekuatan nasional memiliki institusi operasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan strategis nasional, dan peneliti mengkategorikan temuan data ke dalam beberapa proposisi:

1. Kerja sama industri pertahanan antar negara melibatkan aktor negara dan beroperasi dalam kerangka lembaga antar negara, di mana entitas negara melakukan hubungan industri pertahanan dengan entitas negara lain atau mitra swasta.

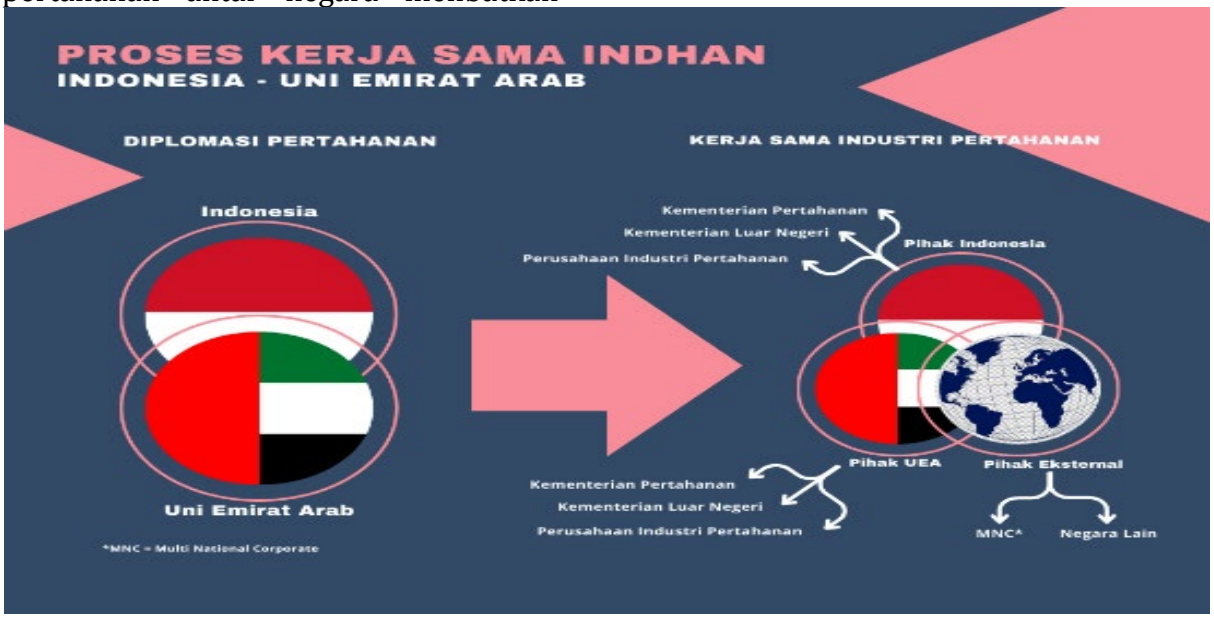

Bagan 2. Proses Kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Sumber: Peneliti (2023)

Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa perkembangan hubungan kerja sama industri pertahanan dipengaruhi oleh diplomasi pertahanan bilateral, yang berkembang sebagai respons terhadap dinamika global. Selain pihak yang bekerja sama, aktor eksternal muncul sebagai mediator antara Indonesia dan UEA. Negara-negara seperti Prancis, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya juga memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam kerja sama industri pertahanan antara kedua negara.

2. Diplomasi pertahanan yang dilakukan antara pihak-pihak merupakan bentuk kekuatan lunak, yang merujuk pada penggunaan cara non-paksa, seperti pengaruh ekonomi dan budaya, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Diplomasi pertahanan khususnya melibatkan penggunaan keterlibatan dan kerja sama militer untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan positif dengan negara lain. Dalam kasus kerja sama ini, jelas terlihat bahwa motif ekonomi dan budaya sangat mendorong pencapaian tujuan bersama, yaitu menciptakan kemandirian industri pertahanan yang diimplementasikan melalui kerja sama, negosiasi, dan persuasi dalam mencapai tujuan bersama industri pertahanan.

3. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi antarnegara melalui diplomasi dan bentuk kerja sama lainnya. Berdasarkan kerja sama ini, peneliti telah mengidentifikasi beberapa proposisi. Pertama, peneliti mencatat bahwa kerja sama industri pertahanan antarnegara memiliki potensi untuk berkelanjutan dalam jangka panjang, di mana kedua negara berkomitmen untuk mempromosikan stabilitas pertahanan dan keamanan, yang ditandai oleh kerja sama industri pertahanan sebagai dasar kerja sama pertahanan dan non-pertahanan. Kedua, negara-negara tersebut memiliki identitas asli dan komunitas asli dengan banyak kesamaan, seperti agama mayoritas, pola perilaku sosial, visi dan misi bersama mengenai kepentingan nasional (kontra-terorisme, ancaman eksternal, radikalisme, dll.), dan pertumbuhan kerja sama industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masing-masing negara. Pendekatan holistik seperti ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai kerja sama pertahanan dan non-pertahanan yang sedang diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Hal ini terbukti dari berbagai kerja sama yang dilakukan di luar industri pertahanan, seperti dalam kerangka CBM (Confidence-Building Measures) dan CB (Capacity Building). Diplomasi semacam ini juga dapat membuka ruang dialog dan peluang kerja sama di luar sektor pertahanan dan keamanan.

Gambar 3. Alur Diplomasi dan Kerjasama Indonesia-UEA Sumber: Peneliti (2023)

4. Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti menganalisis data Indonesia dan UEA ke dalam dua kategori, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi kedua negara di wilayah tersebut. Kategorisasi ini terbatas dan berfokus pada karakteristik industri pertahanan. Data kekuatan dan kelemahan Indonesia dan UEA diperoleh dari penilaian kemampuan strategis masing-masing negara, termasuk sumber daya dan kompetensi dalam berinteraksi dengan wilayah masing-masing. Penilaian kekuatan dan kelemahan memberikan wawasan tentang pengaruh internal dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing negara. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen seperti Buku Putih Pertahanan, Pembaruan Strategis Pertahanan, Buku Putih Kebijakan Luar Negeri, kebijakan resmi, dan penelitian, semuanya konsisten dengan pandangan yang disampaikan oleh narasumber. Karakteristik kekuatan dan kelemahan Indonesia dan UEA dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan Pertahanan Indonesia – UEA

Aspek	Negara	
	Indonesia	**Uni Emirat Arab**
Kekuatan	• Memiliki industri pertahanan yang tangguh dengan memproduksi berbagai senjata dan peralatan untuk militer dan non-militer • Nomor 7 nomor PPP terbaik di dunia • Memiliki sumber daya alam yang bervariasi, yang dapat dimanfaatkan untuk *bahan baku* • Anggota utama *G-20 Economy*. • Populasi yang besar dan berkembang pesat, yang menghadirkan pasar dan tenaga kerja yang signifikan • Aktor negara sentral di kawasan ASEAN	• Alpalhankam yang cakap, fokus pada pertahanan udara dan rudal • Industri pertahanan yang kuat, yang memproduksi berbagai senjata dan persediaan untuk militer, termasuk tank, kendaraan lapis baja, dan artileri • Banyak yang berinvestasi dalam teknologi dan peralatan canggih, seperti *drone* dan *keamanan cyber* • Ini memiliki ikatan ekonomi yang sangat kuat dengan negara lain dan ini dapat membantu mereka dalam banyak hal di sektor pertahanan dan keamanan mereka • Aktor negara pusat di kawasan Timur Tengah
Kelemahan	• Alpalhankam sudah *ketinggalan zaman*, sehingga sulit bagi militer untuk mempertahankan negara secara efektif dan menanggapi ancaman keamanan • Kurangnya dana yang memadai untuk sektor pertahanan dan keamanan • Birokrasi dalam negeri yang cenderung kurang efektif	• Sangat bergantung pada peralatan dan teknologi militer dari mitra pihak lain • Ketergantungan impor cukup tinggi yang berpotensi meningkatkan harga lainnya

Sumber: Peneliti (2023)

5. Selain kekuatan dan kelemahan, peneliti juga menganalisis kumpulan data kerjasama industri pertahanan ke dalam kategori peluang dan ancaman. Kategori-kategori ini dianalisis berdasarkan penilaian terhadap lingkungan, dengan mempertimbangkan konteks politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan dari masing-masing kawasan yang kompleks.

Peluang dan ancaman disaring berdasarkan dinamika kekuatan regional dan kompleksitas wilayah masing-masing negara. Peluang dan ancaman masing-masing negara digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Peluang dan Ancaman Indonesia - UEA

Aspek	Negara	
	Indonesia	**Uni Emirat Arab**
Peluang	• Peluang diplomasi pertahanan dan non-pertahanan dalam kerangka kemandirian industri pertahanan, terutama dari segi ekonomi dan teknologi • Peluang kerja sama pertahanan serta non-pertahanan lainnya sebagai konsekuensi kerja sama industri pertahanan (perluasan kawasan strategis di wilayah timur tengah)	• Peluang diplomasi pertahanan dan non-pertahanan dalam kerangka kemandirian industri pertahanan, terutama dari segi SDM serta politik internasional • Peluang kerja sama pertahanan serta non-pertahanan lainnya sebagai konsekuensi kerja sama industri pertahanan (perluasan kawasan strategis di wilayah ASEAN)
Ancaman	• Resesi global 2023 • Tekanan *diplomatic hard power* dari negara lain (Amerika Serikat, Iran, dan lainnya)	• Resesi global 2023 • Tekanan *diplomatic hard power* dari negara lain (Amerika Serikat, Malaysia dan lainnya)

Sumber: Peneliti (2022)

Analisis ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi diplomasi pertahanan dalam kerja sama industri pertahanan, menggunakan analisis SWOT untuk meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dan implementasi sistem diplomasi pertahanan, serta melibatkan analisis perencanaan strategis dari masing-masing negara berdasarkan data yang telah diproses, yang kemudian diuraikan dalam matriks SWOT sebagai berikut:

a. Strategi S-O
   (1) Menggunakan keunggulan Indonesia baik sumber daya alam mentah maupun manusia melalui diplomasi pertahanan serta kerja sama pertahanan industri pertahanan
   (2) Membuka kemungkinan-kemungkinan diplomasi pertahanan (baik dari segi CBM, CB, maupun DI) serta kerja sama pertahanan lainnya dengan melibatkan berbagai K/L lainnya
   (3) Mengeksplorasi sinergitas tentang kapabilitas serta kapasitas perusahaan industri pertahanan, terutama yang menyangkut sumber daya manusia

b. Strategi W-O
   (1) Melakukan kerja sama industri pertahanan dengan mempertimbangkan urgensitas pada aspek-aspek yang cenderung memiliki dampak keberlanjutan/sustain

(transfer of technology, joint production, dan joint venture)
(2) Membuka kerja sama dengan pihak UEA dalam memberikan dukungan finansial melalui PMA, joint venture, dana hibah, dan lain sebagainya
(3) Menciptakan ruang-ruang birokrasi yang cenderung efektif serta efisien. Hal ini dapat diimplementasikan dengan mendirikan lembaga strategis atau melakukan kerja sama strategis yang dikhususkan dalam mengelola kerja sama industri pertahanan antar pihak

c. Strategi S-T
(1) Masing-masing pihak membuka ruang-ruang diplomasi dengan mengedepankan soft power pada keunggulan-keunggulan masing-masing negara sehingga dapat meminimalisir potensi resistensi dengan pihak yang dapat mengancam kerja sama tersebut
(2) Memberikan kepastian legitimasi terhadap sumber-sumber daya yang dinilai esensial melalui narasi kolaborasi dan partisipasi diluar kedua belah pihak

d. Strategi W-T
(1) Masing-masing pihak mempersiapkan pengelolaan sumber daya serta perekonomian bidang pertahanan
(2) Mengevaluasi diplomasi pertahanan dengan melakukan soft power serta kompromi dengan antar pihak diluar kerja sama tersebut

Diplomasi pertahanan memainkan peran penting dalam membuka peluang kerja sama industri pertahanan dalam upaya membangun kemandirian dalam industri pertahanan, berdasarkan karakteristik diplomasi pertahanan. Karakteristik ini, seperti yang diuraikan oleh Syawfi (2009), berfungsi sebagai indikator dalam menganalisis peran dan fungsi diplomasi pertahanan yang diimplementasikan melalui kerja sama industri pertahanan. Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, yang dimulai pada tahun 2019, mencerminkan karakteristik diplomasi pertahanan seperti interaksi militer-ke-militer, peningkatan transparansi, membangun kepercayaan, dan mendorong kerja sama. Kerja sama industri pertahanan antara kedua negara juga menghasilkan kemajuan ekonomi dan teknologi global, sementara diplomasi pertahanan berfungsi sebagai jembatan dalam mencapai kepentingan nasional di kawasan ASEAN dan Timur Tengah. Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab mencerminkan karakteristik strategi militer-politik yang bertujuan untuk mencapai keunggulan fisik dan psikologis, menghubungkan kekuatan militer dengan tujuan politik, dan memperkuat hubungan, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kerja sama. Melalui tata kelola pertahanan yang efektif, sebuah negara dapat mengendalikan militer, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, dan mengembangkan kerja sama industri pertahanan yang saling menguntungkan (Clausewitz, 1984) (Lykke, 1998) (Mullen, 2011). Diplomasi pertahanan antara Indonesia

dan Uni Emirat Arab dalam kerja sama industri pertahanan menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi pertahanan memainkan peran dalam mempromosikan perdamaian dunia melalui promosi kerja sama, membangun ketergantungan saling-menyaling, keamanan kolektif, dan inovasi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Implementasi Kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab

Penelitian ini fokus pada analisis kerja sama industri pertahanan antara pemerintah (melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri) dan PT. Pindad, dengan kerangka hukum, khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertahanan Indonesia Nomor 30/2015 tentang Implementasi Kandungan Lokal dan Offset (KLO), sebagai indikator pelaksanaan kerja sama tersebut. Berdasarkan regulasi tersebut, peneliti kemudian mengkategorikan proses kerja sama industri pertahanan menjadi beberapa proposisi sebagai berikut, berdasarkan data yang terkumpul:

1. Kerja sama industri iertahanan diimplementasikan melalui beberapa komponen kandungan lokal, yang dikategorikan berdasarkan peran pemerintah dan pelaku industri pertahanan. Peran pemerintah dalam hal ini berfokus pada kerja sama usaha patungan, investasi, dan pengembangan kompetensi melalui riset dan pengembangan. Di sisi lain, peran perusahaan industri pertahanan (dalam hal ini, PT. Pindad) dilakukan melalui kerja sama produksi berlisensi, produksi bersama, dan pengembangan pemasaran.

Tabel 3. Pelaksanaan Kandungan Lokal dalam Implementasi Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia – Uni Emirat Arab

Pemerintah	Perusahaan
Saham Patungan (*Joint Investment*)	Produksi Berlisensi
Penelitian dan Pengembangan	Produksi Bersama (*Joint Production*)
	Pengembangan Pemasaran

Sumber: Peneliti (2022)

2. Kerja sama Industri Pertahanan diimplementasikan melalui komponen offset, yang dikategorikan berdasarkan peran pemerintah dan pelaku industri pertahanan. Peran pemerintah dalam hal ini berfokus pada kerja sama pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan (dalam hal ini, dilakukan oleh Universitas Pertahanan). Di sisi lain, peran perusahaan industri pertahanan (dalam hal ini, PT. Pindad) dilakukan melalui kerja sama dalam desain/rekayasa dengan beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab.

3. Saat ini, proses implementasi jangka panjang seperti investasi usaha patungan, transfer kompetensi (pendidikan dan pelatihan), dan transfer teknologi sedang dilakukan antara kedua belah pihak. Kerja sama ini bertujuan untuk merumuskan kolaborasi dalam tujuan yang lebih luas dan memberikan efek penangkal yang diharapkan untuk lebih berkembang.

Kerja sama industri pertahanan memiliki beberapa model yang bertujuan untuk menghubungkan kebutuhan industri dan meningkatkan efektivitasnya, dan beberapa skema kolaborasi dapat diilustrasikan dalam kasus ini:

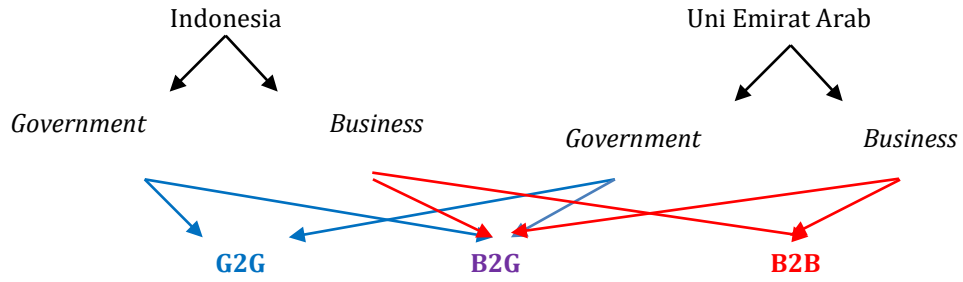

Bagan 3. Bentuk Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Uni Emirat Arab. Sumber: Peneliti (2023)

Keterangan:

- Pemerintah: Mencakup Kementerian, Lembaga/Lembaga Kebijakan, dan Lembaga Pengguna
- Bisnis: Termasuk Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Badan di luar Yurisdiksi Nasional)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, segitiga pertahanan menyoroti peran "kongres" (diwakili oleh lembaga legislatif), "birokrasi" (diwakili oleh lembaga eksekutif), dan "industri pertahanan" (diwakili oleh perusahaan) dalam pengembangan industri pertahanan. Penjelasan mengenai korelasi kerja sama industri pertahanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran kongres, khususnya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi I), dalam industri pertahanan mencakup dukungan pendanaan, pembuatan kebijakan, dan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, transfer aset negara, serta perjanjian dengan implikasi keuangan yang luas bagi negara, dengan fungsi legislasi dan pengawasan yang mendukung efektivitas dan efisiensi perusahaan.
2. Birokrasi, melalui lembaga negara seperti Presiden, Menteri, dan Badan Negara, berperan dalam industri pertahanan dengan menyediakan opsi kebijakan dan pelaksanaan yang sejalan dengan aspirasi publik, serta melonggarkan regulasi dan memberikan perhatian khusus untuk memfasilitasi akses dan transparansi dalam industri pertahanan untuk pengembangan teknologi dan bisnis.
3. Pelaku industri pertahanan berperan dalam industri pertahanan dengan menyediakan dukungan kongres, seperti menciptakan platform untuk aspirasi anggota legislatif, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pertahanan, melaksanakan kegiatan negara yang terkait dengan pengembangan industri pertahanan, dan melakukan lobi kepada pemerintah untuk mendukung sinergi industri pertahanan.
4. Pelaku riset dan pengembangan dalam industri pertahanan, termasuk lembaga riset, organisasi profesional, dan pengguna produk, berperan dalam menciptakan inovasi dan mendorong modernisasi teknologi untuk mengembangkan industri pertahanan sesuai dengan kebutuhan instansi terkait.

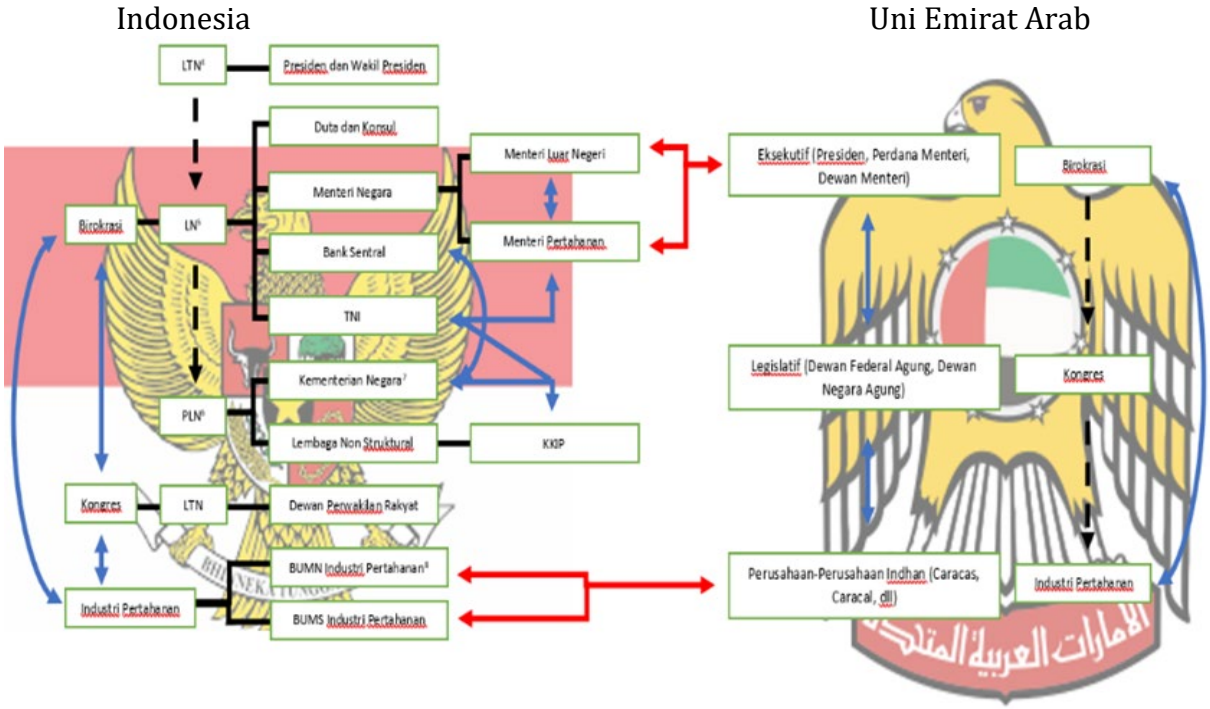

Figure 5. Lembaga-Lembaga didalam Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Uni Emirat Arab. Sumber: Peneliti (2023)

Kerjasama dalam industri pertahanan sebagai konsep diplomasi pertahanan perlu dipertimbangkan dalam konteks politik dan kekuasaan negara, dengan analisis kekuatan dan kelemahan sebagai acuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien, dengan memperhatikan perspektif industri dan bisnis untuk mengevaluasi kinerja kerjasama tersebut. Data yang dikumpulkan oleh para peneliti menggambarkan bahwa upaya membangun kemandirian dalam industri pertahanan telah mengarah pada kerjasama operasional antara negara-negara, dengan pembentukan sistem industri dan pengembangan regulasi yang diharapkan dapat memberikan konsistensi dan urgensi dalam kerjasama tersebut, serta meningkatkan saling kepercayaan dan berfungsi sebagai prototipe bagi kerjasama lainnya, meskipun aturan dan regulasi yang kompleks mengenai kontrak diperlukan untuk memastikan akuntabilitas publik dan mengatasi kurangnya pasar yang kompetitif. Ini dapat dianalisis dari empat perspektif: anggaran pertahanan; peningkatan industri pertahanan; indeks teknologi terbarukan; dan keunggulan kompetitif.

Dari segi anggaran pertahanan, Uni Emirat Arab memiliki kekuatan keuangan yang lebih baik daripada Indonesia, dihitung dari anggaran pertahanan nasional dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing negara. Kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara dan melibatkan berbagai pemain industri dan sektor terkait, dengan fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi dalam menanggapi tuntutan multipolarisasi global. Kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab juga melibatkan teknologi terbarukan dan berfokus pada konvergensi instrumen militer dan non-militer, dengan tujuan untuk memajukan pencegahan dan penegakan lintas domain serta tantangan akses terbatas/penolakan area asimetris, sambil memanfaatkan hubungan

diplomatik dan platform kerjasama yang sudah ada. Kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menggunakan keunggulan kompetitif dalam hal fokus biaya dan fokus diferensiasi, dengan fokus pada kebutuhan administratif, regulasi, dan dukungan politik, sambil juga mempertimbangkan tingkat ketergantungan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.

Analisis peneliti tentang kerjasama industri pertahanan mencakup aspek-aspek yang seharusnya ada dalam kebijakan pertahanan, dengan mengacu pada penelitian Prakoso (2021). Dalam hal integritas, implementasi kebijakan kerjasama industri pertahanan memerlukan keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait, di mana diplomasi pertahanan melibatkan Presiden, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri, sementara formulasi kebijakan melibatkan Parlemen dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), dan perusahaan, akademisi, dan peneliti berfokus pada riset dan pengembangan industri pertahanan. Dengan demikian, kerjasama lintas sektor antara pemerintah dan bisnis dilakukan untuk mengembangkan industri pertahanan antara pihak-pihak yang terlibat. Dari perspektif interaktif, Kementerian Pertahanan memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan kerjasama industri pertahanan, dengan Presiden sebagai pemimpin tertinggi yang mengarahkan semua Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan hubungan bilateral, sebagaimana terlihat dari penandatanganan IUEA-CEPA dan interpretasi Kementerian Pertahanan sebagai stimulus untuk diskusi lebih lanjut. Hal ini mengarah pada koordinasi lintas sektor yang luas untuk mengembangkan kerjasama tersebut. Mengenai transparansi, kurangnya transparansi dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia-Uni Emirat Arab merupakan isu utama, terkait dengan keterbatasan informasi mengenai pendapatan dan investasi, penggunaan klasifikasi untuk membatasi informasi, dan peran terbatas dari perusahaan swasta serta regulasi operasional bilateral yang perlu dievaluasi secara menyeluruh, karena berpotensi menghambat perkembangan industri pertahanan dan tujuan kemandirian Indonesia. Aspek kontrol dari kerjasama tersebut menggambarkan bahwa Presiden Indonesia sebagai figur sentral memiliki peran kunci dalam kerjasama industri pertahanan dengan Uni Emirat Arab, termasuk memberikan dukungan politik, mempromosikan peningkatan kualitas produk, mengatasi hambatan birokrasi, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan global. Selanjutnya, aspek akuntabilitas dalam kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang kuat untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan transparan, meskipun masih diperlukan aturan operasional yang lebih jelas dan terperinci.

PEMBAHASAN

Diplomasi pertahanan memainkan peran penting dalam menghadapi kompleksitas dan sifat dinamis hubungan internasional, terutama dalam kebijakan industri pertahanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan elemen seperti kedaulatan, kepentingan nasional, ancaman, dan lingkungan domestik-internasional. Diplomasi pertahanan merujuk pada penggunaan kekuatan militer suatu negara secara non-kekerasan untuk mencapai tujuan strategis pemerintah melalui kerjasama dengan negara lain, dan telah menjadi alat penting bagi negara-negara besar di

dunia untuk mengatasi isu global dan mencapai tujuan dalam urusan internasional (Edmonds & Mills, 1998) (Plessis, 2008) (Cottey & Forster, 2004) (Multazam, 2010). Para peneliti menjelaskan bahwa evaluasi diplomasi pertahanan dalam kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia, terutama dalam konteks hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab.

Pertama, diplomasi pertahanan dengan nilai komoditas bersama. Nilai komoditas bersama berfungsi sebagai dasar strategi diplomasi pertahanan antara negara-negara, di mana kerjasama pertahanan dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan bilateral dalam jangka panjang. Hal ini dicapai melalui pengembangan nilai komoditas bersama berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai yang dijunjung oleh kedua negara (Soesatro & Baswir, 2019) (Siracusa, 2010). Diplomasi bertujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui hubungan diplomatik dengan berbagai pembuat kebijakan di seluruh dunia, dan sebagai tokoh kunci dalam konteks ASEAN, Asia, bahkan global, Indonesia harus mengadopsi strategi diplomasi yang sejalan dengan agenda global untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Titik penting dalam strategi diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab adalah implementasi visi Indonesia sebagai GMA dalam konteks global. Hal ini melibatkan penguatan hubungan bilateral dalam bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, moderasi keagamaan, dan membentuk nilai komoditas bersama untuk mencapai tujuan diplomasi pertahanan yang efektif. Dalam kerjasama industri pertahanan, diplomasi pertahanan melibatkan pemerintah sebagai pelaku utama (track satu), perusahaan industri pertahanan dan lembaga riset dan pengembangan sebagai pelaku pendukung (track dua), tetapi juga harus melibatkan pelaku lain untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kedaulatan kedua negara melalui pertukaran nilai dan peningkatan nilai sumber daya.

Kedua, transfer teknologi, diversifikasi, dan segmentasi menuju kemandirian industri pertahanan. Setelah Perang Dingin, terjadi pergeseran dalam wacana dari mempertahankan fasilitas produksi lengkap menjadi mempertahankan otonomi strategis melalui pengembangan teknologi yang dapat digunakan secara ganda (*dual-use*), yang memungkinkan kontraktor pertahanan untuk mendiversifikasi ke pasar sipil sambil tetap mempertahankan kemampuan produksi senjata, meskipun hal ini dapat memengaruhi daya saing mereka di pasar sipil; pilihan lain adalah lisensi, kolaborasi, dan usaha patungan yang sering ditempuh oleh kontraktor pertahanan utama melalui konsep teknologi dual-use dengan spin-on dan spin-off (Susdarwono, 2021). Implementasi teknologi *dual-use* dalam industri pertahanan dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara, tetapi perlu seimbang dengan risiko keamanan dan privasi yang harus dikelola dengan baik dalam kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Diversifikasi dan segmentasi teknologi pertahanan adalah strategi penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengembangan teknologi, dengan kemandirian industri pertahanan sebagai faktor kunci dalam hal ini. Penerapan teknologi *dual-use* dalam

kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab memiliki potensi untuk mengembangkan produk pertahanan yang canggih dan inovatif serta meningkatkan daya saing global, tetapi membutuhkan strategi diversifikasi dan segmentasi yang tepat sesuai dengan standar keamanan yang ketat. Pembelian produk pertahanan Indonesia oleh Uni Emirat Arab dapat menjadi indikator keberlanjutan kerjasama industri pertahanan, dengan potensi untuk kolaborasi lebih lanjut dalam penelitian, pengembangan, dan produksi bersama, menjadi alternatif dan jalan yang mengganggu untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan kedua negara.

Ketiga, akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan pertahanan adalah komponen penting dari kebijakan luar negeri suatu negara yang mempengaruhi perilaku internasional dan melibatkan sektor pertahanan yang bertanggung jawab atas kemampuan militer, hubungan dengan negara lain, dan respons terhadap krisis, dengan tujuan menjaga kemandirian dan mengatasi ancaman eksternal. Kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menarik perhatian pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan pertahanan. Untuk memaksimalkan diplomasi pertahanan dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia-UAE, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Upaya untuk mencapai akuntabilitas dalam industri pertahanan melibatkan penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), implementasi nilai-nilai anti-korupsi, reformasi organisasi, sinergi dalam pengadaan peralatan, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, seperti yang terlihat dalam implementasi yang berhasil oleh PT. Pindad (Persero) yang diakui karena praktik tata kelola perusahaan yang baik (Nurulloh, Simbolon, & Deksino, 2022). Implementasi efektif tata kelola perusahaan dalam industri pertahanan memerlukan penanggulangan faktor penghambat, sementara instrumen operasional harus mempertimbangkan aspek keseluruhan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam kerjasama dengan pihak asing. KKIP didirikan untuk mengawasi pengembangan sistem senjata utama dalam negeri hingga tahun 2029 melalui empat tahap, yang meliputi stabilisasi industri pertahanan, peningkatan kemampuan kerja sama produksi, pengembangan industri dan kerjasama internasional, serta memprioritaskan kemandirian industri pertahanan dan daya saing dalam pasar internasional. Memang, pendirian KKIP bertujuan untuk mencapai tujuan tahap ketiga Rencana Induk Pengembangan Industri Pertahanan (2020-2024), yaitu pengembangan industri dan kerjasama internasional. Salah satu tujuan yang jelas disebutkan adalah revitalisasi dan evaluasi dua aspek dari lima aspek implementasi kebijakan pertahanan, yaitu akuntabilitas dan transparansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan diskusi dari data yang dianalisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kerjasama industri pertahanan Indonesia-UAE menekankan komponen konten lokal dan offset, melibatkan pembuat kebijakan seperti DPR (Parlemen), Presiden, perusahaan industri pertahanan, dan lembaga penelitian. Kerjasama ini memberikan manfaat ekonomi, kemampuan industri, kemajuan teknologi, tetapi juga memerlukan evaluasi terhadap transparansi kebijakan dan akuntabilitas. Dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia-UAE, strategi

diplomasi pertahanan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan saling kepercayaan, mencapai kemandirian industri pertahanan, dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas birokrasi yang memadai, dengan menekankan kekuatan lunak melalui pameran pertahanan, kunjungan kenegaraan, dan perjanjian kerjasama pertahanan untuk mencapai visi tahap ketiga Rencana Induk Pengembangan Industri Pertahanan pada tahun 2024.

Berdasarkan diskusi data penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi. Pertama, dalam diplomasi pertahanan dengan Uni Emirat Arab, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan memfokuskan pada kekuatan lunak dan nilai komoditas bersama melalui promosi budaya dan bahasa Indonesia, membangun hubungan dengan masyarakat sipil UAE, dan kerjasama dalam sektor yang terintegrasi dengan pertahanan, seperti keamanan, pendidikan, agama, budaya, dan ekonomi, untuk mencapai manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi kedua negara. Kedua, Indonesia dan Uni Emirat Arab dapat meningkatkan kerjasama dalam industri pertahanan dengan mentransfer teknologi terbarukan melalui teknologi dual-use (spin-on dan spin-off), yang dapat dicapai melalui pengembangan produk pertahanan terkini, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi industri pertahanan kedua negara. Ketiga, dalam kerjasama industri pertahanan dengan Uni Emirat Arab, Indonesia perlu mendiversifikasi dan membagi produksi untuk mengembangkan produk pertahanan yang berbeda, meningkatkan daya saing, dan memaksimalkan potensi industri pertahanan kedua negara. Terakhir, Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap akuntabilitas dan transparansi kebijakan pertahanan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan internasional, termasuk dalam kerjasama industri pertahanan dengan Uni Emirat Arab, dengan meningkatkan transparansi dalam pengadaan pertahanan, mereformasi perencanaan pertahanan, dan memperkuat mekanisme pengawasan dan audit.

REFERENSI

Clausewitz, C. v. (1984). *On War.* New York: Oxford University Press.

Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assitance.* New York: Routledge.

Creswell, J. C. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed-Method Approaches.* Lincoln: SAGE Publication.

Edmonds, M., & Mills, G. (1998). *Beyond the Horizon: Defence, Diplomacy and South Africa's Naval Opportunities.* Johannesburg: South African Institute of International Aff airs and the Centre for Defence and International Security Studies.

Hoyt, T. D. (2007). *Military Industry and Regional Defense Policy: India, Iraq, Israel.* New York: Routledge.

Kaldor, M., Albrecht, U., & Schméder, G. (1998). *Restructuring the Global Military Sector.* London: United Nations University.

Komisi Pemilihan Umum. (2014). *Visi misi Jokowi – JK.* Retrieved from Komisi Pemilihan Umum: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

Lykke, A. F. (1998). *Military Strategy: Theory and Application.* Carlisle, PA: U.S. Army War College.

Matthews, R., & Maharani, C. (2009). The Defense Iron Triangle Revisited. In R. A. Bitzinger, *The modern defense industry : political, economic, and technological issues* (pp. 38-59). California: ABC CLIO.

Mullen, M. G. (2011). *The National Military Strategy of the United States of America,*

2011: Redefining America's Military Leadership. Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff.

Multazam, A. (2010). *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Noll, R. G. (1971). *Reforming Regulation: An Evaluation of the Ash Council Proposals.* Washington DC: Brookings Institution.

Nurulloh, M. I., Simbolon, L., & Deksino, G. R. (2022). MEMBANGUN AKUNTABILITAS INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 339-344.

Plessis, A. d. (2008). *Defence Diplomacy Conceptual and Practical Dimension with Specific Reference to South Africa.* Pretoria: Department of Political Sciences, University of Pretoria.

Porter, M. E. (1980). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.* NYC: Simon & Schuters.

Prakoso, L. Y. (2016). *Teori Implementasi Kebijakan Pertahanan IITCA.* Garut: CV. Aksara Global Akademia.

Prakoso, L. Y. (2021). *Metode SWOT AHP dalam Merencanakan Strategi Pertahanan.* Garut: CV Aksara Global Akademia.

Siracusa, J. M. (2010). *Diplomacy: a very short introduction.* Oxford University Press.

Soesatro, H., & Baswir, R. K. (2019). *Indonesia and the Future of the Indo-Pacific: Strategic, Economic and Political Perspectives.* Routledge.

Sorensen, D. S. (2009). *The Process and Politics of Defense Acquisition: A Reference Handbook.* London: Praeger Security International.

Stohl, R. (2008). The Defense Industry and Foreign Policy. In *The Defense Industry.*

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta.

Supriyatno, M. (2017). *Tentang Ilmu Pertahanan.* Jakarta: Gramedia.

Syawfi, I. (2009). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Negara: 2003-2008.* Jakarta: Master Thesis, University of Indonesia.

The Jakarta Post. (2017). *Jokowi's Global Maritime Axis Doctrine Key to Indonesia's Future*. Retrieved from The Jakarta Post: https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20170306/281633895027864